

AKSES INFORMASI DI PERPUSTAKAAN

Alit Sri Mulyani *
Ratna Sufiatin**

Abstract

This article discusses the access of information in the library. The problem of access information emerged when the society changes from industrial society to information society. In the information society, information as a commodity. Information have an economic value. The following problem that there are a poor society and the rich society so that appearing information poor society and information rich society. To reduce the gap between information poor society and information rich society, the librarian have a conflict between free and fee to access the information in the library. Both pro and contra for free and fee to access information in the library discussed in this article.

Key word : Information society ; Industry society ; User oriented ; Information poor Information rich

Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan dan kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Perkembangan teknologi informasi mendorong masyarakat industri (*industry society*) pelan-pelan beralih ke masyarakat informasi (*information society*).

Dalam era globalisasi, hampir setiap orang dalam kegiatannya tidak dapat terlepas dari informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Setiap aspek kehidupan selalu dihubungkan dengan ketersediaan informasi. Hal itu menunjukkan bahwa informasi telah mendapatkan

*) Pustakawan di Perpustakaan Nasional ; mahasiswa Program Studi Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan, Program Pascasarjana UI

***) Pustakawan di UPN Yogyakarta ; mahasiswa Program Studi Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia

tempat yang penting dalam aktivitas masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang mencari informasi. Artinya, demand atau permintaan terhadap informasi begitu tinggi sehingga informasi memiliki nilai ekonomi yang tinggi pula.

Dari kenyataan tersebut, saat ini sudah banyak orang yang bersedia mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Konsekuensinya adalah perpustakaan sebagai penyedia informasi harus menyediakan informasi yang akurat dan *current* yang dapat diakses oleh pengguna informasi yang semakin lama semakin meningkat.

Masalah yang timbul kemudian adalah penyediaan informasi yang akurat tersebut ternyata hanya dapat diperoleh dengan mengeluarkan biaya. Untuk menyediakan sumber-sumber informasi yang memadai diperlukan *knowledge generator* dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang banyak memakan biaya (Pendit, 1992:36). Karena itu, biasanya sumber informasi harus menyediakan dana yang tidak sedikit untuk membangun pangkalan data informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi. Terlebih lagi prasyarat akses informasi dalam era informasi ini adalah *user oriented*, artinya users atau pengguna informasi berhak menentukan informasi apa yang dikehendaki sehingga permintaan dari users menjadi penentu dalam penyediaan informasi. Situasi seperti ini akhirnya menimbulkan komersialisasi informasi.

Dalam komersialisasi informasi orang bersedia membayar setiap informasi yang dibutuhkan. Alasannya adalah tingkat kepentingan informasi dan manfaat yang akan diperolehnya juga sama atau lebih besar dari nilai uang yang dibayarkannya untuk membeli informasi tersebut. Disamping itu, penyebab timbulnya komersialisasi informasi antara lain disebabkan oleh: *pertama*, kurangnya waktu dari pengguna informasi untuk mencari informasi yang dibutuhkannya, *kedua*, tersebarnya informasi dalam berbagai bentuk dan sumber sehingga sulit untuk diketahui, dan *ketiga*, keinginan pengguna informasi untuk memperoleh informasi yang siap pakai.

Untuk memenuhi tuntutan dari pengguna informasi, maka perpustakaan sebagai sumber informasi harus mampu memberikan pelayanan yang memadai dengan menyediakan

informasi yang benar-benar relevan dengan permintaan pengguna. Di sisi lain timbul persoalan adanya diskriminasi dalam melakukan akses informasi bagi pengguna, dimana pengguna yang secara ekonomi kurang mampu membayar informasi akan sulit memperoleh informasi yang relevan.

Sebaliknya pengguna yang secara ekonomi mampu membayar informasi, akan mudah mengakses informasi ke sumber informasi. Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya dua kelompok, yaitu kelompok yang miskin informasi (*information poor*) dan kelompok yang kaya informasi (*information rich*). Konsekuensi dari keadaan tersebut adalah penyebaran informasi menjadi tidak merata. Akibatnya lanjutannya adalah munculnya kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerawanan sosial. Dalam pendidikan, misalnya. Anak yang memiliki uang banyak dapat membeli buku-buku pelajaran sedangkan anak yang tidak memiliki uang tidak dapat membeli buku pelajaran. Akibatnya, timbul kesenjangan dalam pendidikan antara anak yang mampu membeli informasi (buku pelajaran) dan yang tidak mampu sehingga muncul friksi-friksi dalam pendidikan.

Ekonomi Informasi

Martino mendefinisikan informasi sebagai suatu produk atau hasil dari suatu proses (Martino, 1986:37). Proses itu sendiri merupakan suatu kegiatan dari mengumpulkan data, menyusun, meringkas, mengekstrak, dan menginterpretasikannya sesuai dengan persepsi penerima.

Seiring dengan pembangunan peradaban manusia, kecenderungan akan pentingnya informasi dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat menonjol. Informasi menjadi faktor penting dalam ekonomi karena setiap pengambilan keputusan dalam suatu sistem manajemen tidak bisa terlepas dari informasi.

Menurut Beniger yang dikutip oleh Putu Laxman Pendit, pada dasarnya informasi sudah selalu digunakan dalam kegiatan ekonomi dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan (Pendit, 1994:36). Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan dalam bisnis, dimana dalam setiap pengambilan keputusan manajer selalu mencari informasi yang dapat

diandalkan. Kegiatan ekonomi atau bisnis selalu mempunyai tujuan tertentu, dan dalam mencapai tujuan tersebut memerlukan pengendalian dan pengawasan yang bergantung pada masukan yang berupa informasi.

Ekonomi informasi adalah ekonomi yang berpangkal pada informasi, dimana ekonomi tumbuh dan berkembang berdasarkan pada produksi dan konsumsi informasi (Pendit, 1996:39). Dengan demikian maka informasi menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dibandingkan dengan benda, energi, atau jasa yang sebelumnya hal tersebut dianggap memiliki nilai ekonomi. Ekonomi informasi muncul sebagai akibat adanya perubahan sifat dasar ekonomi yang berkaitan dengan komputer dan teknologi informasi dan akibat timbulnya berbagai masalah yang berhubungan dengan penciptaan, pengolahan, arus informasi dan penggunaan informasi dari perspektif ekonomi neo klasik.

Braman mengemukakan 3 konsep ekonomi informasi, yaitu pertama, walaupun ekonomi berjalan sebagaimana biasanya, industri dalam sektor informasi telah berkembang. Kedua, ekonomi itu sendiri telah berkembang melalui modifikasi bentuk informasi yang sebelumnya tidak pernah di komoditi. Ketiga, alur informasi telah menempati pasar sebagai kunci mekanisme koordinasi pasar. (Braman, 1995:99-100).

Teknologi informasi juga memungkinkan konsumsi informasi dalam jumlah besar dan dengan kecepatan yang luar biasa. Teknologi informasi sebagai suatu sistem informasi membantu manusia dalam kesulitan melakukan proses ekstraksi, produksi dan distribusi informasi. Tetapi teknologi informasi ini memerlukan biaya yang cukup tinggi sehingga kelahiran teknologi informasi juga akan menimbulkan cara berpikir baru, disiplin kerja baru, dan nilai-nilai baru dalam ekonomi.

Dari uraian di atas, jelas bahwa sumber informasi dituntut untuk mampu mengelola informasi menjadi suatu yang vital, sehingga informasi menjadi komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Komersialisasi Informasi

Pendapat yang paling umum tentang tujuan pokok dari sistem informasi adalah untuk menunjang para manajer atau

**PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

peneliti dalam pengambilan keputusan (Effendi, 1987:13). Bila kita simak pendapat tersebut, maka dalam tahap-tahap pengambilan keputusan informasi selalu diperlukan, sehingga tahap tersebut selalu memerlukan masukan informasi.

Dengan demikian, maka informasi menjadi suatu hal yang vital dalam setiap aspek kehidupan, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, maupun politik, informasi menjadi penting peranannya dalam berbagai segi kehidupan. Peran yang penting inilah yang menimbulkan upaya untuk memberikan nilai pada informasi dan nilai ini dihubungkan dengan kegunaannya untuk mengubah suatu keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi pengguna. Tetapi pemberian nilai terhadap informasi bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena dibalik hal tersebut diperlukan penanganan yang profesional dan bersungguh-sungguh.

Pada masyarakat yang berorientasi informasi, maka informasi menjadi suatu komoditi yang diperlukan oleh masyarakat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Bila informasi menjadi komoditi, maka harus ada pialang informasi (*information broker*). Pialang informasi ini biasanya berfungsi sebagai penyedia informasi, dan sekaligus mengumpulkan, mengelola dan memproses informasi. Pekerjaan-pekerjaan tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bila dilihat secara seksama maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan informasi dimulai ketika user atau pengguna mulai mencari informasi, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan informasi tersebut. Karena pada setiap kegiatan tersebut memerlukan biaya maka muncullah istilah komersialisasi informasi. Komersialisasi informasi muncul karena mahalnya harga informasi yang disediakan oleh sumber informasi.

Perpustakaan sebagai pusat layanan informasi

Sebagai suatu institusi yang berfungsi sebagai penyedia, pengelola dan penyebar bahan pustaka (konsep lama), maka perpustakaan perlu mencermati berbagai perubahan yang terjadi berkaitan dengan informasi dan kebutuhan informasi dalam masyarakat. Dalam sistem informasi berbasis komputer, fungsi perpustakaan tidak hanya sebagai penyedia

informasi dalam bentuk fisik (bahan pustaka), melainkan harus sudah mengarah pada isi dari informasi tersebut.

Permasalahannya pada saat ini adalah apakah perpustakaan boleh menjual informasi, sehingga fungsi perpustakaan yang semula hanya sebagai institusi tanpa laba yang hanya memberikan jasa layanan informasi, bergeser menjadi institusi yang berorientasi pada bisnis atau ekonomi?

Permasalahan ini muncul karena perpustakaan mengemban citranya sebagai lembaga yang menyediakan informasi gratis (*free information*). Permasalahan kedua akan muncul, karena bila perpustakaan menyediakan akses *fee* (memungut biaya) dalam informasi, maka prinsip kebebasan mengakses informasi akan dilanggar. Karena jika akses *fee* dalam informasi diterapkan di perpustakaan, maka akan ada sekelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses informasi yang disebabkan karena ketidakmampuannya membayar informasi, sehingga akan timbul jurang antara masyarakat yang kaya informasi dan yang miskin informasi. Padahal jika kita amati, untuk mengadakan sumber-sumber informasi diperlukan biaya, sehingga sesungguhnya tidak ada informasi yang *free* (gratis).

Bila perpustakaan memperlakukan informasi sebagai komoditi, maka tujuan dari komersialisasi informasinya adalah untuk:

- a. Menambah anggaran perpustakaan
- b. Menutupi kekurangan biaya ATK perpustakaan.
- c. Mengubah citra perpustakaan sebagai lembaga tanpa laba
- d. Menghasilkan pemasukan bagi perpustakaan.

Sementara itu ASLIB memberikan beberapa terobosan dalam akses informasi diperpustakaan yang dikenakan biaya dan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Siapa yang akan dikenai biaya
- Apa yang akan dikenai biaya
- Bagaimana mengenakan biaya
- Berapa besarnya biaya
- Bagaimana pangsa pasar.

Dari uraian tersebut maka bila perpustakaan akan merancang layanan informasi komersial, perlu diantisipasi keadaan pasar. Hal ini tentunya berhubungan dengan jenis pengguna dan jenis informasi yang dibutuhkan. Utari

mengelompokkan jenis pengguna dan jenis informasi yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Pemegang keputusan dan Perencana
Informasi yang diperlukan informasi akurat, mutakhir, ringkas dan cepat, dan biasanya informasi tersebut berkaitan dengan perkembangan situasi politik, ekonomi, dan sosial, baik nasional maupun internasional.
- b. Manajer dan Administrator
Informasi yang diperlukan tentang pola proyek penelitian dan pengembangan. Data statistik, perundang-undangan, perkembangan IPTEK.
- c. Ilmuwan, Peneliti, dan Konsultan Kelompok ini memerlukan tinjauan perkembangan suatu disiplin ilmu yang sedang ditekuni, rancangan proyek penelitian dan pengembangan, serta perencanaan informasi yang bersifat mutakhir.
- d. Pengajar, Dosen, dan Mahasiswa Kelompok ini memerlukan tinjauan kepustakaan, tinjauan perkembangan suatu disiplin, buku-buku dan informasi mutakhir.
- e. Praktisi, Teknisi, dan Industriawan Informasi yang diperlukan harus dapat menunjang kelancaran tugas sehari-hari.
- f. Tenaga Penyuluh Informasi yang diperlukan lebih spesifik dan populer
- g. Media Massa Informasi yang diperlukan biasanya diperoleh langsung dari sumbernya.
- h. Pengelola informasi Lebih menyukai informasi dalam bentuk terbitan referensi seperti tinjauan kepustakaan, tinjauan perkembangan, direktori, dan ensiklopedi.
- i. Pemakai akhir (end user) Kelompok ini biasanya memerlukan informasi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut (Utari, 1984).

Dari pengelompokkan tersebut maka perpustakaan dapat menentukan tarif informasi terhadap masing-masing kelompok sesuai dengan kebutuhan dan bobot informasi yang mereka perlukan. Dalam perpustakaan, komersialisasi informasi dilakukan bukan untuk keuntungan materi semata-mata, tetapi untuk menghargai atau mengangkat nilai dari informasi itu sendiri. Jadi upaya komersialisasi di perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan nilai dari informasi yang ada di

perpustakaan dan bukan hanya melulu untuk mem"bisnis"kan informasi yang ada di perpustakaan.

Dalam melakukan komersialisasi informasi, perpustakaan hendaknya mampu mengemas informasi sedemikian rupa, sehingga pengguna tidak perlu bersusah payah melakukan penelusuran informasi sendiri. Adapun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan perpustakaan untuk melakukan komersialisasi informasi antara lain: silang layan, penelusuran melalui CD-ROM dan internet termasuk pencetakan artikel yang dibutuhkan, foto kopi, dan lain-lain.

Beberapa perpustakaan di Indonesia yang sudah melakukan komersialisasi informasi antara lain: PDII-LIPI, British Council, SEAMEO Biotrop dan berbagai Perpustakaan Perguruan Tinggi yang telah menyediakan jasa penelusuran melalui CD-ROM dan internet.

Permasalahan *fee* dan *free* dalam akses informasi di perpustakaan

Dalam mengakses informasi, ternyata terdapat perbedaan pendapat antara mereka yang setuju dengan adanya biaya penelusuran (*pro-fee*) dan yang tidak setuju (*anti-fee*), seperti yang dikemukakan oleh Peter R. Young sebagai berikut:

a. *Argumentasi anti-fee, mengemukakan bahwa:*

- Akses informasi merupakan hak fundamental setiap warga negara
- Akses informasi yang dikenai biaya merupakan layanan terakhir di perpustakaan
- Sistem biaya merupakan sesuatu yang illegal
- Sistem biaya bersifat diskriminatif
- Sistem biaya merupakan bentuk pajak ganda
- Perpustakaan mengkhususkan jasa yang dikenai biaya
- Dengan adanya biaya, dapat mengurangi dukungan masyarakat kepada perpustakaan

b. *Argumentasi pro-fee, berpendapat bahwa:*

- Pengenaan biaya meningkatkan pengakuan peran perpustakaan
- Efisiensi penggunaan jasa publik semakin meningkat
- Timbul promosi jasa berdasarkan kebutuhan dan permintaan
- Mendorong peningkatan manajemen
- Membatasi konsumsi yang sia-sia dan berlebihan

- Banyak pemakai yang mampu membayar biaya
- Tanpa penarikan biaya, perpustakaan tidak dapat melayani pemakai secara lebih luas karena keterbatasan dana/biaya.

Munculnya argumentasi tersebut menunjukkan besarnya perhatian masyarakat dan ilmuwan terhadap perkembangan perpustakaan. Timbulnya pro dan kontra terhadap *fee* dan *free* dalam akses informasi di perpustakaan mengakibatkan munculnya berbagai pendapat di kalangan Pustakawan sendiri. Di satu pihak, sebagian Pustakawan berpendapat bahwa perpustakaan sebagai lembaga tanpa laba dan sejak awal berdirinya tidak berorientasi kepada bisnis (*anti-fee*) sehingga penarikan biaya untuk akses informasi di perpustakaan tidak layak diberlakukan. Di pihak lain, sebagian lagi pustakawan berpendapat bahwa perkembangan teknologi ikut mempengaruhi pergeseran fungsi perpustakaan yang semula tanpa laba menjadi ada kecenderungan berorientasi ke bisnis (*pro-fee*).

Adanya pergeseran dari *free* ke *fee* dalam akses informasi disebabkan karena masalah biaya yang dibutuhkan oleh perpustakaan untuk mengakses sumber-sumber informasi. Perpustakaan tidak dapat berjalan bila hanya mengandalkan biaya/ dana yang berasal dari lembaga induk saja, sebab globalisasi teknologi informasi menyebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap sektor. Karena itu, perpustakaan harus dapat mengelompokkan penggunaannya untuk menentukan jenis informasi yang akan diberikan dan biaya yang dikenakan.

Kesiapan Pustakawan dalam era informasi

Pustakawan dituntut untuk bekerja secara profesional, karena semakin banyak ragam informasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi, menyebabkan pustakawan sebagai penyedia informasi harus benar-benar melakukan tugasnya secara profesional. Pustakawan yang profesional minimal memiliki kriteria sebagai berikut:

- Ketrampilan dalam melakukan tugas-tugas Pustakawinformatika (*skill*),
- pengetahuan dalam bidang Pustakawinformatika (*knowledge*),
- kemampuan menganalisis tugas (*ability*),

- kedewasaan psikologis dalam melaksanakan tugas yang dibebankan.

Seiring dengan perkembangan informasi, profesi pustakawan tidak hanya sebagai pemberi layanan jasa informasi, tetapi sudah mengarah pada pialang informasi (*information broker*). Pustakawan sebagai pialang informasi harus mempunyai kejelian dalam menilai informasi sehingga mampu menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai pialang informasi, pustakawan harus mampu melakukan kegiatan penelusuran informasi dan menyediakan berbagai jenis informasi. Kemampuan ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan keterampilan dan wawasan atau pengetahuan yang luas agar dapat mengakses sumber-sumber informasi yang tidak diketahui oleh pengguna. Pustakawan juga harus memiliki ciri kemandirian sehingga tidak terikat pada pihak atau institusi lain.

Penutup

Secara umum informasi dibutuhkan oleh semua orang. Oleh karena itu setiap orang mempunyai hak untuk mengakses informasi. Tetapi dilain pihak untuk menyediakan informasi diperlukan tenaga dan biaya, sehingga pada dasarnya tidak ada informasi yang bebas dari biaya (*free*).

Perpustakaan sebagai pusat informasi dan layanan masyarakat, idealnya menyediakan layanan informasi yang bebas dari biaya. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa untuk menyediakan informasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, sementara alokasi dana untuk perpustakaan masih terbatas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengenakan biaya kepada para pengguna tertentu dan untuk jenis informasi tertentu. Namun demikian, diakui juga bahwa tidak semua orang mampu dan mau mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa: Masalah *fee* dan *free* dalam akses informasi masih menimbulkan pro dan kontra ; akses informasi yang dikenai biaya (*fee*) dapat diterima atas pertimbangan kebutuhan akan informasi bagi pengguna serta proses aksesnya melalui teknologi informasi; akses informasi yang bebas biaya (*free*)

juga dapat diterima dengan pertimbangan bahwa perpustakaan memperoleh subsidi dana dari pemerintah atau lembaga induk dimana perpustakaan itu berada

Daftar Bacaan

Braman, Sandra. (1995). "Alternative conceptualizations of the information economy" *Advances in Librarian*. Vol.19.

Mustafa, B. (1993). "Komersialisasi layanan perpustakaan: tinjauan & prospek". *Jurnal Perpustakaan Pertanian*. Vol.2.

Pendit, Putu Laxman. (1992). "Semakin dibutuhkan akses ke sumber informasi yang bebas dan adil". *Majalah Ikatan Pustakawan Indonesia*. Vol.14 (2).

(1994). "Makna dan peran informasi dari masa ke masa". *Jurnal Ilmu Perpustakaan & Informasi*. Vol.1 (2).

Repo, Aalto J. (1989). "The value of information: approaches in economics, accounting and management". *Journal of the American Society for Information Science*. Vol.40 (2).

Usman, Mansyur dan Wafiah El Wafa Manwan. (1994). "Solusi antara profesionalisme pustakawan & komersialisasi informasi". *Jurnal Perpustakaan Pertanian*. Vol. 3 (1).

Utari, Budiharjo. (1984). *Kebutuhan informasi IPTEK dalam laporan perkembangan informasi ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Jakarta: PDII.

Young, Peter R. (1994). "Changing information access economics: new rules for libraries and librarians". *Information Technology and Libraries*, 13 (2), hal.103-104.